

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PROSES MENINGKATKAN
POTENSI DESA
(DESA BANUA HANYAR KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN)**

Sairil Rahman, H. Deli Anhar, Sugiannor

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120118

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 0010106201

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1106038903

E-mail : sairilrr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, karena masih banyak ketidak tahuan masyarakat mengenai Proses Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tersebut

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokomentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Proses Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Di Desa Banua Hanyar Meliputi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaporan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Dana Desa adalah adanya Partisipasi Masyarakat yang sangat antusias, misal saat pembangunan jalan masyarakat menghibahkan tanahnya, dan Sarana dan Prasarana yang ada dikantor Desa Banua Hanyar Sangat membantu Pemerintah di desa Banua Hanyar dalam mengerjakan tugasnya, Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimana masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang Dana Desa sehingga Bantuan nyata misal berupa Tenaga atau fisik tidak Banyak, Covid-19 Dimana menjadi salah satu kendala yang juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Banua Hanyar Karena Semua Dana yang ada di tahun 2021 dipakai untuk BLT Dana Desa.

Kata Kunci : Dana desa, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to find out how the Process of Implementing Village Fund Management in Banua Hanyar Village, Batumandi District, Balangan Regency, because there is still a lot of public ignorance about the Village Fund Management Process in the Village.

This type of research is a case study with research using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques with observation, interview, and documentation techniques.

The results showed that, the process of implementing village fund management in Banua Hanyar village includes planning, management, reporting, administration and accountability, the supporting factor in managing village funds is the participation of the community who is very enthusiastic, for example when building roads, people donate their land, and facilities and infrastructure. The existing infrastructure facilities at the Banua Hanyar Village office really help the Government in Banua Hanyar village in carrying out their duties, while the inhibiting factor is Human Resources where there are still some people who do not know about the Village Fund so that real assistance, for example in the form of energy or not much physical , Covid-19 Which is one of the obstacles that also greatly affects development in Banua Hanyar Village because all existing funds in 2021 are used for the BLT Village Fund.

Keywords: Village Fund, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya dalam penyelenggaraan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Dan 2 Tentang Desa.

Secara tegas Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan suatu ketentuan yang jelas dalam menyelenggarakan administrasi dan tanggung jawab keuangan Desa, antara lain memberikan kemudahan dalam memutuskan hal-hal administrasi yang berkaitan dengan desa.

Administrasi publik seperti yang ditunjukkan oleh Harbai Pasolong (2007), adalah : Setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas publik terhadap berbagai individu yang memiliki masing-masing gerakan yang bermanfaat dalam suatu kelompok atau unit, dan menawarkan kepuasan meskipun hasil sebenarnya tidak terkait dengan item tersebut. Dengan cara ini, daerah secara konsisten meminta administrasi publik yang berkualitas dari otoritas publik, meskipun fakta bahwa permintaan ini sering tidak sesuai dengan asumsi dengan alasan bahwa administrasi terbuka eksperimental yang terjadi selama ini masih kusut, sedang, mahal, dan melelahkan. Hal ini justru berdampak pada peningkatan kualitas pemerintahan, khususnya terus diabaikannya upaya perbaikan pemerintahan dan tidak adanya peningkatan pembangunan dalam pemerintahan serta tidak adanya kekuatan pendorong bagi pemerintah lingkungan untuk meningkatkan kualitas administrasi.

Birokrasi adalah salah satu alat penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh otoritas publik, sehingga birokrasi memiliki tugas penting, karena birokrasi adalah tatanan pekerjaan hierarkis yang besar dan kompleks dengan berbagai lapisan perkembangan, prinsip-prinsip formal, dan pekerjaan luar biasa yang sepenuhnya ditujukan untuk menjalankan fungsi administrasi. Yang memutuskan apakah bantuan yang diberikan telah memenuhi syarat atau tidak.

Pemerintah daerah harus memiliki pilihan untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan daerah setempat, upaya ini ditangani teknologi informasi dan telekomunikasi atau E-Government, sehingga masyarakat umum dapat memperoleh data secara efektif dan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aperatur pemerintahan daerah yang bersih. Daerah diberi kewenangan yang seluasluasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana adalah funds management, yaitu pengelolaan dana sendiri dan cadangan luar yang diperoleh dari berbagai organisasi yang ditentukan untuk meningkatkan (keuntungan) sambil menjaga likuiditas dan keamanan yang cukup dalam membuat usaha. Pengelolaan cadangan memiliki dan cadangan luar dapatkan dari berbagai instansi untuk memperluas manfaat sekaligus menjaga likuiditas dan keamanan yang cukup dalam membuat spekulasi (funds management). Semua jenis pelaksanaan regulasi diselesaikan dalam beberapa tahapan yang meliputi penataan,

penimbunan, penggunaan, pencatatan dan pengelolaan yang pada saat itu ditutup dengan tanggung jawab (pelaporan) terhadap keluar atau masuknya dana / uang didalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) di waktu tertentu. Dengan melakuka setiap tahapan dalam penatausahaan aset dapat dioptimalkan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa yang merupakan suplai dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah Desa.

Pengelolaan Dana Desa adalah semua kegiatan yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, pengaturan, perincian, dan tanggung jawab Keuangan Desa. Selanjutnya pelaksanaan kewenangan Desa tergantung pada hak istimewa awal dan tenaga ahli terdekat dalam skala Desa yang disubsidi oleh APBD, selain itu cenderung dibiayai dari APBN dan APBD. Apa yang harus ditekankan di sini adalah bahwa Pengelolaan Dana Desa tidak akan dimulai sampai tujuan dan target ditetapkan atau dikenali oleh pilihan strategi.

Desa Banua Hanyar adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang menerima Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Sumberdaya manusia di Desa Banua Hanyar.

Dalam hal ini khususnya dimata masyarakat dimana masyarakat Desa Banua Hanyar masih menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang bersangkutan dengan Proses Pengelolaan Dana Desa, baik itu untuk melakukan pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya manusia di Desa

Banua Hanyar, hal tersebut terjadi karena kurangnya keterbukaan pemerintah desa dan masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang tidak tahu sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penghambat atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Banua Hanyar salah satunya adalah Sumberdaya manusia dimana ada masih banyak ketidak tahuan masyarakat tentang bagaimana proses pengelolaan dana desa itu.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana proses Pengelolaan Dana Desa tersebut, dan apa saja faktor yang mempengaruhi saat melaksanakan Pengelolan Dana Desa tersebut, dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam proses meningkatkan potensi desa (Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan meningkatkan desa menjadi yang lebih baik?
2. Apa sajakah Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan desa menjadi yang lebih baik?

TUJUAN PENELITIAN

1. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai atau tidak khususnya dimata masyarakat desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.

3. Untuk mengetahui Apa saja Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.

TINJAUAN PUSTAKA

- **Pengertian Desa**

Pengertian Desa Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Pengertian Pengelolaan**

Menurut G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

1. Faktor Pendukung Pengelolaan

Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat ini antara lain adanya dukungan regulasi dari pemerintah, sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

2. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan

Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- **Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang dikeluarkan dalam APBN yang diharapkan untuk desa yang digerakkan melalui rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kemajuan, perbaikan daerah, dan penguatan daerah. Pengelolaan dana desa ditentukan dengan menggunakan dua perspektif, yaitu nilai dan pemerataan. Bagian dari nilai tercermin dalam penunjukan esensial di mana setiap desa mendapat nilai yang sama . Untuk sementara, ekuitas tercermin dalam persamaan yang diselesaikan tergantung pada beberapa segmen di kota. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90% dari total dana desa lengkap di mana setiap kota mendapat jumlah yang sama dari pagu dasar setiap kota. Sedangkan sisa 10% dialokasikan dengan perkiraan khusus untuk setiap desa. Pagu dana desa diatur dalam APBN atau APBN-P.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017) dalam upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan pengalaman lainnya.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara komprehensif, dan dalam alur yang menarik seperti kata-kata dan bahasa dalam suasana luar biasa yang adalah umum dan teratur. menggunakan teknik logika yang berbeda.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Pada metode penelitian deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Apalagi semua yang terkumpul mungkin akan menjadi jalan menuju apa yang sebenarnya telah dieksplorasi. Laporan eksplorasi akan berisi bagian informasi untuk memberikan garis besar pendahuluan laporan. Informasi tersebut berasal dari pembicaraan dengan naskah, catatan lapangan, foto, kaset, laporan individu, catatan atau pembaruan, dan arsip otoritas lainnya..

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan

menafsirkan hasil penelitian. Demikian dengan pengumpulan data dan informasi melewati wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk informasi proses Pelaksanaan dana desa lewat keterangan kepala desa selalu pimpinan pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan pejabat sekretaris desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Lingkup Dana Desa Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggung jawaban

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Potensi Desa

- Program Pembangunan Desa
Program Pembangunan Desa Merupakan sebuah Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Kepala Desa dan perangkat desa yang meliputi: Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta operasional Pemerintah Desa. Belanja BPD yang meliputi Tunjangan dan operasional BPD. Belanja RT dan operasional. Penetapan dan penegasan batas Desa, Pendataan Desa, Penyusunan tataruang Desa, Penyelenggaraan musyawarah Desa, Pengelolaan informasi Desa, Penyelenggaraan perencanaan Desa, Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, Penyelenggaraan kerjasama antar Desa, Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Jenis kegiatan yang termasuk dalam perencanaan pembangunan desa bidang pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar,
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 4. Pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- Potensi dan Masalah Potensi sumber daya manusia di Desa Banua Hanyar juga cukup baik karena rata – rata penduduk desa sudah melaksanakan pendidikan sampai tingkat pendidikan SLTP dan SLTA/ sederajat, dan dari sumber daya pembangunan berupa bangunan fisik seperti jalan, JUT, titian dan sarana air bersih dan lainnya di Desa Banua Hanyar juga cukup banyak mempunyai aset – aset sarana prasarana tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa Dimata Masyarakat Di Desa Banua Hanyar

Dalam Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Faktor pendukung
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Sarana dan prasarana
2. Faktor penghambat
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
 - c. Covid-19
 - d. Komunikasi

KESIMPULAN & SARAN

• **Kesimpulan**

1. Proses Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban. Pengelolaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sudah terencana cukup baik dimana masyarakat pun sangat aktif dalam hal yang mengenai dengan pembangunan desa, seperti gotong royong , atau pun rapat perencanaan atau musrenbangDes.
2. Faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan dana desa terbagi menjadi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung dimana faktor penghambatnya adalah salah satunya sumber daya manusia dimana masyarakat masih banyak yang sangat tidak tau mengenai Dana

Desa dimana masyarakat yang tidak tau kurang ikut berpartisipasi karena menganggap hal itu tidak penting, Covid-19 juga salah satu faktor penghambat proses pelaksanaan pengelolaan dana desa karena Prioritas desa selama Wabah ini adalah BLT Dana Desa dan Penyemprotan Corona di Desa Banua Hanyar juga banyak dilakukan jadi untuk melakukan pembangunan ataupun perbaikan lainnya tidak bisa terlaksana, sedangkan faktor pendukung adalah adanya sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat yang tau mengenai dana Desa sangat Antusias.

• **Saran**

1. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sangat diperlukan adanya control yang sangat aktif dari pemerintah desa itu sendiri, dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, seharusnya dizaman yang sekarang ini masyarakat sudah mengetahui hal yang berkaitan dengan Dana Desa supaya upaya dalam meningkatkan kemajuan desa setidaknya lebih mudah karna masyarakat mendukung penuh kegiatan tersebut, jadi hal ini adalah tantangan Aparat Desa agar kedepannya bisa menjelaskan kepada masyarakat yang masih buta akan hal itu, baik itu melalui Pertemuan seluruh masyarakat atau pun bertemu secara langsung dengan masyarakatnya.
2. Aparat Desa Banua Hanyar, Masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan dapat berkerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa Banua Hanyar dengan meminimalisir faktor

penghambat dan meningkatkan faktor pendukung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya Offset

Haris Herdiansyah. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial,

Jakarta : Selemba Humanika

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung : Alfabeta

Jurnal

Luthfi Nur Fahri. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap

Manajemen keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program

Pembangunan Desa. Jurnal Publik

Syahrul Syamsi. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan

Anggaran dana desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nurul Hidayah dan Iin Wijayanti. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

(DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017

Nardi Sunardi dan Rosa Resmana. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap

Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa

sejahtera mandiri di desa cihambulu, kec. pabuaran, kab. subang. jurnal

sekuritas (saham, ekonomi,
keuangan dan investasi)

Putu Mastika dan I Nyoman Suprpta.
(2019). implementasi kebijakan dana
desa dalam pengembangan potensi desa di
desa pegadungan kecamatan
sukasada kabupaten Buleleng. Locus
Majalah Ilmiah FISIP

Website

Undang-Undang Desa <https://www.dpr.go.id>
> dokjdih > uu > UU_2014_6

PP No. 43 Tahun 2014 - Peraturan BPK
<https://peraturan.bpk.go.id> > Home >
Details>

pp-no-4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor ...<http://jdih.kkp.go.id> >
peraturan >

pp-43-2014

Dokumen

RPJM Desa Banua Hanyar (2020),
Sistematika Racangan RPJM Desa.
Kantor

Kepala Desa Banua Hanyar.

Rancangan Peraturan Desa Banua Hanyar
Nomor 3 Tahun 2020, Tentang
Perubahan

Dan Pendapatan Belanja Desa. Kantor
Kepala Desa Banua Hanyar